

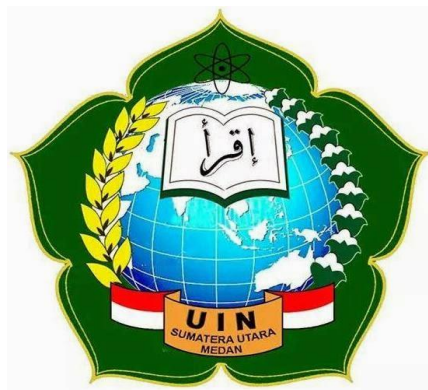
**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD HAFZHAN

NIM. 0502173443



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

Oleh :

MUHAMMAD HAFZHAN

NIM. 0502173443

Program Studi :

AKUNTANSI SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hafzhan
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 29 Februari 2000
NIM : 0502173443
Program Studi : (S1) Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Pancing I Link. VII Kecamatan Medan Labuhan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan)**” adalah benar karya asli saya atau penelitian saya dan bukan karya orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Hafzhan

NIM. 0502173443

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
MEDAN)**

Oleh :

Muhammad Hafzhan

NIM. 0502173443

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 30 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA

NIDN. 2021057503

Pembimbing 2



Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A

NIDN. 2003018501

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, M.A

NIDN. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN)**” an. Muhammad Hafzhan, NIM 0502173443 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 16 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

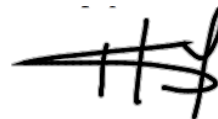
Medan, 16 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua



Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, M.A
NIDN. 2001077903


Sekretaris





Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Anggota

1. 
Dr. Nurlaila, SE., MA., CMA
NIDN. 2021057503

2. 
Rahmat Syahriza, S.Th.I, M.A
NIDN. 2003018501

3. 
Dr. Kamilah, SE. Ak, MSi, CA
NIDN. 2023107901

4. 
Rahmat Daim Harahap, M.Ak
NIDN. 0126099001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Muhammad Hafzhan (2021), “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan” dibawah bimbingan Dr. Nurlaila, SE, MA, CMA sebagai Pembimbing Skripsi I dan Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan asosiatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner serta sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian berdasarkan dari hipotesis uji parsial dengan angka signifikan 5% dengan t_{tabel} sebesar 2,028 menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan t_{hitung} untuk variabel X_1 (-1,110). Dan menunjukkan bahwa variabel Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan t_{hitung} untuk variabel X_3 (-1,389). sedangkan variable Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan t_{hitung} untuk variabel X_2 (2,063). Hasil penelitian dari hipotesis uji simultan dengan angka signifikan 5% dengan F_{hitung} sebesar 3,322 dan F_{tabel} sebesar 2,87 ditunjukkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan).

Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Selama penyusunan skripsi penulis banyak memperoleh bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih khususnya yang Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang sangat saya kagumi dan cintai Ayahanda Khairur Rizal dan Ibunda Rika Muriza yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, doa, dan nasihat serta semangat yang tulus hingga saat ini, kemudian Terima kasih kepada Abang dan Adik tersayang Muhammad Farhan, Muhammad Yafizham dan Muhammad Raihan yang telah memberikan doa dan semangat serta dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, S.H.I, M.A selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Harmain, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Nurlaila, SE., M.A, CMA selaku dosen Pembimbing I skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
6. Ibu Rahmi Syahriza, S.Th.I, M.A selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan serta saran-saran dari awal penyusunan skripsi sampai dengan selesai.
7. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu yang luar biasa serta membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
8. Terima kasih kepada Oleeed (M. Ilham Kholid) Sahabat terbaik, teman melalak, dan Sahabat seperjuangan skripsi yang selalu memberikan nasihat serta motivasinya yang luar biasa kepada penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Muhammad Reza Sahabat terbaik dan sahabat seperjuangan yang sangat luar biasa selama di kuliah yang selalu memberikan motivasi terbaiknya dan semangat serta doanya kepada penulis dalam pelaksanaan pengerjaan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Wahyul Huda Nanda Sahabat terbaik dan seperjuangan di KSEI UIE UINSU yang sangat luar biasa yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Muhammad Irfan Nasution (Iboy) orang yang paling langka, paling aneh tapi tetap sahabat terbaik yang telah

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


12. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar organisasi ku mulai dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Syariah, Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economics UINSU (KSEI UIE), Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat UINSU, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI Medan Labuhan) dan Teman teman Remaja Masjid Jam'I Simpang Atas Martubung.
13. Terima kasih kepada teman-teman Magang BPKAD Kota Medan : Oled, Wahyul, Reza, Irfan dan Fadhil.
14. Terima kasih kepada teman-teman KKN Kelompok 24 Desa Pardomuan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Pakpak Bharat yang sudah memberikan semangatnya kepada penulis.
15. Terima kasih kepada kakak-kakak senior ku Kak Ridha Zhuhriana, kak Yuyun Tanjung, kak Oby, kak Angel, bang Mursidi dan bang sakban.
16. Terima kasih kepada Amru Alkhoir abang senior terbaik dari STAI Binjai yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terima kasih kepada Mulky Al-rasi Hutagalung adik kelas ku yang baik hati yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Terima kasih kepada seluruh staf pegawai yang ada dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang sudah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan riset dan juga magang.
19. Terima kasih kepada Rizki Isnani, Hastia Simanjuntak, Ira Yona Ramadhani, Yustika Sitompul, Aryawan Saputra, Risvi Maharani dan seluruh teman teman Akuntansi Syariah E (AKS-E) Stambuk 2017 yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi.
20. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, arahan serta doa yang diberikan kepada penulis dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapat Ridho-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 30 Juli 2021

Penulis,



Muhammad Hafzhan

NIM. 0502173443

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
SURAT PERSETUJUAN	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	11
A. Kajian Teoritis	11
1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11
a. Pengertian Akuntabilitas	11
b. Dimensi Akuntabilitas Publik	13
c. Pengertian Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah	15
d. Syarat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15
e. Konsep Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	15
f. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam	17
2. Kejelasan Sasaran Anggaran	18
a. Pengertian Anggaran.....	18
b. Tujuan Anggaran.....	19
c. Fungsi Anggaran	20
d. Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran	21
e. Karakteristik Kejelasan Sasaran Anggaran	22
f. Kejelasan Sasaran Anggaran dalam Perspektif Islam.....	23

3. Pengendalian Akuntansi	28
a. Pengertian Pengendalian Akuntansi.....	28
b. Pengendalian Akuntansi dalam Perspektif Islam	32
4. Sistem Pelaporan	33
a. Pengertian Sistem Pelaporan Kinerja.....	33
b. Pentingnya Laporan Kinerja	34
B. Penelitian Sebelumnya	35
C. Kerangka Konseptual	41
D. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
1. Lokasi Penelitian	44
2. Waktu Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel.....	45
1. Populasi.....	45
2. Sampel	46
D. Data Penelitian.....	47
1. Jenis Data.....	47
2. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Definisi Operasional Variabel	48
G. Teknik Analisis Data	52
1. Analisis Deskriptif	52
2. Uji Kualitas Data	52
3. Uji Asumsi Klasik.....	53
4. Analisis Regresi Linear Berganda	55
5. Uji Hipotesis	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan	58
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	62

3. Deskripsi Data Penelitian	66
4. Uji Kualitas Data	72
5. Uji Asumsi Klasik	80
6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	85
7. Uji Hipotesis.....	87
B. Pembahasan.....	91
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya.....	35
Tabel 3.1	Waktu Penelitian.....	45
Tabel 3.2	Daftar Jumlah Pegawai	45
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	49
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan	67
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Divisi Bagian Pekerjaan	68
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia	70
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif	71
Tabel 4.6	Hasil Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran (X1).....	72
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas Pengendalian Akuntansi (X2).....	74
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Sistem Pelaporan (X3)	76
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).....	77
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas.....	80
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas	83
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinearitas	84
Tabel 4.13	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	86
Tabel 4.14	Hasil Uji t.....	88
Tabel 4.15	Hasil Uji F.....	89
Tabel 4.16	Uji Model R^2	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4.1 Lambang Pemerintah Kota Medan	60
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan Normal <i>P-Plot</i>	81
Gambar 4.3 Histogram.....	82
Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas dengan <i>Scatter Plot</i>	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.¹ Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa anggaran merupakan kerja (output) terutama berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Karena anggaran merupakan hasil kerja (output), maka anggaran dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut penganggaran.² Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan

¹ Indraswari Kusumaningrum, *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”*, (Tesis Pascasarjana Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro, 2010), h. 2

² Arfan Ikhsan, et.al., *Akuntansi Sektor Publik* (Medan : MADENATERA, 2018), h. 54

fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran diperkirakan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.⁴

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

³ Anjarwati “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (studi pada SKPD se-Kabupaten, Kota Tegan dan Kabupaten Pemalang)*,” (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2012), h.13

⁴ Fajar Bayu Putri Perwirasari “*Faktor Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)*” (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2016), h.6

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pengendalian merupakan suatu proses melalui manajemen suatu organisasi membuat keyakinan yang beralasan bahwa sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan andal, kebijakan, hukum dan peraturan yang relevan diikuti. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata dapat dilakukan apabila dilakukan pengendalian manajemen yang baik. Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan system akuntansi.

Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai system pengendalian yang berbasis akuntansi atau system pengendalian akuntansi. System pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan system formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Penggunaan system pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tentu dan memilih alternative terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Sistem pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktifitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja menejer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya akan digunakan untuk pengambilan

keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggung jawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran.⁵

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.⁶

Di dalam penelitian ini, penulis memilih di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebagai objek penelitian. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar ke-3 di Indonesia. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas, serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

⁵ Devika diah, “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang*”, (Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2015), h. 3

⁶ Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2011 tentang *Akuntabilitas Instansi Pemerintahan*, h. 2

Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Dengan adanya target pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti ditahun sebelumnya pemerintah Kota Medan melakukan tahap uji coba pada sistem pelaporan anggaran dan keuangan dengan menggunakan sebuah aplikasi yang berbentuk web yaitu sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan yang sebelumnya menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) ujar bapak Syahrial selaku kabid anggaran tidak langsung.

Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kota Medan, namun dalam menjalankan program ini tidak lah mudah, pada awal penerapan system aplikasi SIPD masih mengalami kendala diakibatkan beberapa pegawai belum memahami system aplikasi tersebut, sehingga pelaksanaannya belum mencapai tahap maksimal. Dengan berjalannya waktu penerapan system aplikasi SIPD berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala namun bisa diatasi.

System aplikasi SIPD juga terkendala oleh pemberlakuan system Work Form Home (WFH) yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, beberapa pegawai yang mengalami keterlambatan penginputan dan masih ada operator yang masih belum dapat mengerti menggunakan aplikasi berbentuk web ini, banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian juga terhambat dikarenakan jaringan SIPD sering error.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Dana Rizky Anatasia (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris

Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa secara parsial variable sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan variable kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi memiliki pengaruh negative terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Heksi Kinasih (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Puworejo), menyatakan hasil Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan Ketaatan pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka identifikasi masalah

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan sasaran anggaran yang kurang terlaksana dengan baik terhitung pada tahun 2020 bulan januari sampai oktober.
2. Pelaksanaan pengendalian akuntansi yang tidak terlaksana dengan baik atas penggunaan Sistem terbaru yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih ditemukannya keterlambatan penginputan data, dan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda.

3. Peralihan perubahan sistem dari SIMDA ke Pemendagri No. 77 Tahun 2020 yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih belum dapat dimengerti penggunaan aplikasi berbentuk web ini, dan juga jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi penghambatan dalam penyusunan.

C. Batasan Masalah

Dari uraian di atas, penulisan ini lebih difokuskan mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan?
4. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

- b. Mengetahui pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- c. Mengetahui pengaruh system pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
- d. Mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat antara lain sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai hal-hal yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam menyusun penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan.

b. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan bahwa pentingnya Kejelasan sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan untuk meningkatkan atau memaksimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah sumber pustaka di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi dan representatif khususnya yang

berhubungan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a. Pengertian Akuntabilitas

Pada dasarnya, akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak mengetahui, hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk didengar pendapatnya.

PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.⁷

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik secara umum terdiri atas dua macam, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas vertikal.

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya

⁷ Afilu Hidayatullah, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke", (Jurnal Universitas Musamus Merauke, 2010).

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal.

Sedangkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan ini kemudian memunculkan perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga tersebut.⁸

Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good corporate governance). Implikasinya, kini keduanya menjadi bahasan yang marak dan interchangeable, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang participative sebagai suatu konsekuensi logis (Akbar, 2012). Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya

⁸ Fajar Bayu Putri Perwirasari “*Faktor Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)*” (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2016), h. 20

berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:⁹ 1) pertanggungjawaban dana publik; 2) penyajian tepat waktu; dan 3) adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

b. Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

⁹ *Ibid*, h. 21

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.¹⁰

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi .

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atau kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Disamping keempat akuntabilitas diatas ditambahkan akuntabilitas financial yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.¹¹

¹⁰ Margaretha hendriani Y, “*Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul*”, (Jurnal Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), h. 19

¹¹ *Ibid*, h. 19

c. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).¹²

d. Syarat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

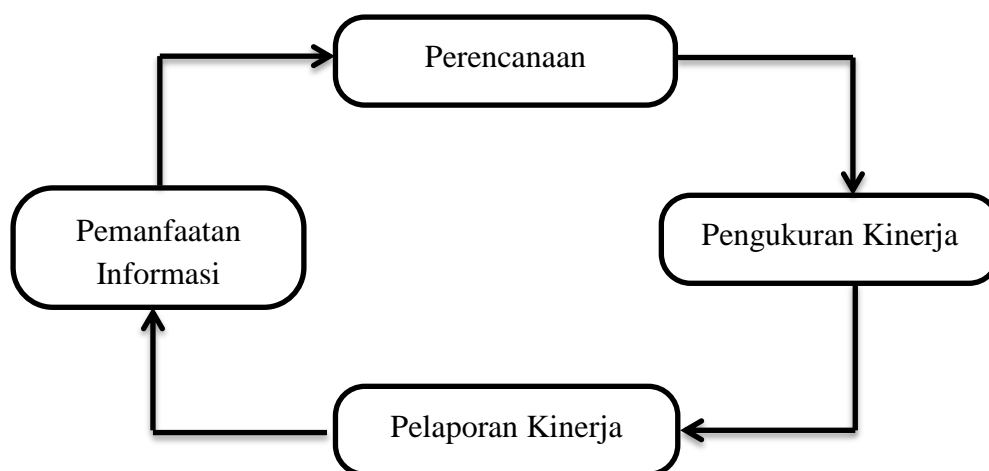
e. Konsep Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni: 1) accountability for probity and legality; 2) process Accountability; 3) performance Accountability; 4) programme Accountability; dan 5) policy

¹² *Ibid*, h. 25

Accountability. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permenpan No.25 Tahun 2012, pengukuran kinerja¹³ digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.¹⁴



Gambar 2.1

Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

¹³ Fajar Bayu Putri Perwirasari “*Faktor Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)*” (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2016), h. 22

¹⁴ *Ibid*, h. 23

f. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (*stakeholders*) dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah SWT. Islam Memiliki pandangan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah Swt karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat.¹⁵

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah refleksi atau bagaian dari kinerja organisasi publik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Adapun tentang akuntabilitas yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Annisa 04 ayat 58 yang berbunyi :

¹⁵ Muhammad ridwan, "Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen), Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2016, h. 5

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

2. Kejelasan Sasaran Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*.¹⁶ Anggaran adalah rencana manajemen yang tertulis dan dinyatakan dalam satuan rupiah. Agar dapat menumbuhkan partisipasi dan motivasi para manajer dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan maka semua tingkatan manajemen dari semua bagian harus dilibatkan dalam penyusunan anggaran. Anggaran yang realistis akan meningkatkan koordinasi antar individu, terlaksananya kebijakan manajemen dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷

Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas ke arah tujuan organisasi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen pencatatan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan

¹⁶ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009), h. 61

¹⁷ Baldric Siregar, *Akuntansi Biaya Edisi 2*, (Jakarta, Salemba Empat : 2013), h.43

pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Sedangkan menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya.

Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik, terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja, dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.¹⁸

b. Tujuan Anggaran

Anggaran memberikan tujuan dalam penyusunannya pada sebuah organisasi. Tujuan pada penyusunan anggaran dapat mengkomunikasikan dan mengendalikan berbagai aspek baik secara financial maupun yang terkait operasional dari berbagai divisi. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Merinci jelas sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.

¹⁸ Niswatul khumaidah, *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang”*, (Jurnal Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 27

4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.¹⁹

c. Fungsi Anggaran

Dengan penyusunan anggaran usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh kebijakan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan yang matang. Perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan, akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan ini akan berpegangan pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Adapun fungsi anggaran adalah :

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak. Anggaran memberikan sasaran, target, dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi selama suatu periode tertentu. Oleh karena itu, dalam fungsi perencanaan anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu :²⁰

- a. Memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi.
- b. Menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada tujuan umum yaitu pencapaian usaha.
- c. Memaksa seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan.

¹⁹ *Ibid*, h. 28

²⁰ *Ibid*, h. 29

- e. Mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi.

2. Alat Pengendalian

Anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam fungsi pengendalian ini anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu :

- a. Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan organisasi.
- b. Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau aspek organisasi.
- c. Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi. Dari kedua fungsi anggaran yang telah dikemukakan di atas bisa dilihat bahwa dalam proses implementasinya tidak dapat dihilangkan fungsi perencanaan dan pengendalian. Perencanaan yang berfungsi mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kinerja organisasi. Sedangkan pengendalian yang berfungsi untuk mengusahakan agar kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan pedoman atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.²¹

d. Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifikasi dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya, oleh sebab itu Kejelasan Sasaran Anggaran dapat dilihat dari besar atau kecilnya pengaruh dalam merumuskan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu

²¹ *Ibid*, h. 30

hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran diperkirakan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kejelasan Sasaran Anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Pencapaian kinerja ini akan terkait dengan motivasi, dimana hal ini disebabkan dengan motivasi yang tinggi akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan.²²

e. Karakteristik Kejelasan Sasaran Anggaran

Tujuan dan sasaran anggaran harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut :

1. Spesifik

Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.

2. Terukur

Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya. Meliputi: perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, evaluasi, pemantauan, dan pengendalian.

3. Menantang tapi Realistis

²² *Ibid*, h. 37

Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. Meliputi: luas daerah pemasaran yang ingin dicapai, market share yang ingin dimiliki.

4. Berorientasi pada hasil akhir

Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai bukan pada proses atau cara mencapainya. Meliputi: sasaran program yang telah ditetapkan dan evaluasi terhadap kesulitan sasaran yang dicapai.

5. Memiliki batas waktu

Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai. Meliputi: program kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran anggaran yang dibuat dan program harus disertai target sasaran *output* dan *outcome*.²³

Dari karakteristik diatas dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran diharapkan dapat membantu manajer untuk mencapai program yang telah ditentukan dan tujuan perusahaan sebagaimana tertuang dalam perencanaan anggaran yang juga akan mempengaruhi kinerja dapat meningkat.

f. Kejelasan Sasaran Anggaran dalam Perspektif Islam

Prinsip-prinsip anggaran sangat relevan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam. Oleh karena itu penyusunan anggaran dengan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam sudah menjadi keniscayaan. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi islam yang dapat diterapkan dalam penyusunan anggaran, sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid (Unity/ Ilahiyah/ Ketuhanan) adalah prinsip umum dalam islam, sehingga hukum ekonomi islamlpun menganut prinsip tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid

²³ *Ibid*, h. 39

yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (tidak ada Tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah Q.S. Ali Imran ayat 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutuan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (Q.S. Ali Imran ayat 64)

Berdasarkan atas prinsip tauhid tersebut, maka pelaksanaan hukum ekonomi islam merupakan ibadah. Dengan demikian, bagi seorang muslim yang bekerja menyusun anggaran, maka tidak lain karena sedang beribadah dan memenuhi perintah atau ketetapan Allah, sehingga anggaran yang disusun akan transparan, akuntabel, disiplin, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Prinsip Keadilan (Equilibrium/ Keseimbangan) adalah prinsip yang menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat, prinsip tersebut menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku merugikan. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku merugikan. Dalam penyusunan anggaran

harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini diambil dari Q.S. Al-An‘am ayat 152.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An‘am ayat 152)

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar adalah prinsip yang memposisikan anggaran sebagai pedoman kerja, sehingga bagi yang melakukan penyimpangan (kemungkaran) dapat diberi sanksi, dan yang berprestasi diberi reward. Prinsip amar makruf nahi munkar tersebut ditegaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali-Imran ayat 104)

4. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) adalah prinsip yang menuntut komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia, sehingga penyusunan anggaran harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Prinsip pertanggungjawaban tersebut ditegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 15.

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْلُونَ الْأَذْبَارَ ۖ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: “Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur). Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabnya.” (Q.S. Al-Ahzab ayat 15)

Dalam pengelolaan anggaran, ketelitian pencatatan sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporannya. Dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 282 juga telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatatan, dan saksi dalam pencatatan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
 وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul : Pada waktu rasulullah saw datang kemadinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun.” (Q.S. al-Baqarah: 282)²⁴.

Dari ayat tersebut dapat kita ambil makna yang tersirat, bahwasanya setiap makhluk hidup memiliki aktivitasnya masing-masing, dan setiap aktivitas tersebut akan dicatat dalam kitab amal perbuatan. Dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar akan dicatat secara rinci dan detail oleh Malaikat. Dan kelak buku amalan tersebut akan menjadi saksi di Yaumul Hisab. Untuk itu perlu adanya perencanaan dalam melakukan suatu aktivitas, karena manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia memiliki aktivitas yang dinamis, berbeda dengan tumbuhan dan hewan. karena manusia dibekali oleh akal pikiran, hal ini merupakan faktor yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya di alam dunia.

3. Pengendalian Akuntansi

a. Pengertian Pengendalian Akuntansi

Pengendalian Akuntansi mencakup struktur organisasi dan seluruh metode dan yang terutama menyangkut dan berhubungan dengan penjagaan terhadap kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian data keuangan. Pengendalian akuntansi dapat memastikan pencatatan sesuai standar yang berlaku pada setiap transaksi keuangan secara akurat dan dapat meminimalisasi adanya kesalahan pencatatan. prosedur pengendalian akuntansi memiliki tujuan yaitu informasi keuangan harus dapat dipercaya sehingga pengelola mendapatkan informasi yang akurat

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Bil Hadis*, (Bandung : Cordoba, 2019), h. 48

untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan lainnya, aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan, atau dirusak dengan sengaja, kebijakankebijakan yayasan diikuti, dan peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi.

Pengendalian akuntansi juga berfungsi sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik. Pengendalian akuntansi akan membantu pemerintah dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja. Peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi serta efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah.

Biasanya sistem pengendalian ini mencakup sistem otorisasi, pembagian tugas antara pencatat dan pemegang/penjaga barang/harta dan pemeriksa intern. Pengendalian Akuntansi dirancang untuk meyakinkan :

- a. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan/wewenang manajemen, baik yang bersifat umum atau khusus.
- b. Transaksi dicatat agar memudahkan :
Penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuan laporan tersebut dan Mengadakan pertanggungjawaban atas aktiva.
- c. Penggunaan atas harta/aktiva diberikan hanya dengan persetujuan manajemen.

- d. Jumlah aktiva seperti yang ada pada laporan catatan perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan dilakukan tindakan yang tepat.²⁵

Untuk dapat mencapai tujuan Pengendalian Akuntansi, suatu perusahaan harus mempunyai enam prinsip dasar yaitu:

1. Pemisah Fungsi

Adanya pemisahan fungsi-fungsi akan dapat dicapainya suatu efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu ditinjau dari sistem pengendalian adanya pemisahan fungsi, akan terdapat suatu cek silang (cross check) secara otomatis atas suatu pekerjaan atau pelaksanaan suatu transaksi. Tujuan utama pemisahan fungsi menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan.

2. Prosedur Pemberian Wewenang

Tujuan prinsip ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisir oleh orang yang berwenang. Otorisasi dapat berupa otorisasi umum dan otorisasi khusus. Otorisasi umum menyangkut kondisi umum misalnya, adanya otorisasi terhadap daftar harga standar (yang dibakukan) dan kebijakan kredit untuk penjualan. Otorisasi khusus berhubungan dengan transaksi perorangan, yaitu otorisasi penjualan khusus, penggajian atau transaksi pembelian. Bukti otorisasi khusus adalah adanya dokumentasi pada terjadinya transaksi.

3. Prosedur Dokumentasi

Dokumentasi yang layak adalah penting untuk terciptanya sistem Pengendalian Akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan

²⁵ Niswatul khumaidah, *"Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang"*, (Jurnal Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 43

transaksi. Dokumentasi dapat berbentuk dalam : faktur-faktur, voucher-voucher (bukti perintah mengeluarkan uang), tanda tangan, initial/paraf, dan/cap persetujuan adanya atau pemberian angka cetak pada setiap jenis dokumen adalah membantu terciptanya memelihara pengawasan transaksi.

4. Prosedur dan Catatan Akuntansi

Prinsip ini menekankan pencatatan transaksi dalam bagian akuntansi. Tujuan pengendalian ini adalah, pertama dapat disisipkan atau dibuatnya²⁶ catatan akuntansi yang teliti secara cepat, kedua data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu. Disini diperlukan adanya buku pegangan prosedur akuntansi dan bagan rekening (chart of accounts). Bagan rekening memberi dasar untuk mengadakan klasifikasi transaksi dan membantu penyiapan laporan keuangan.

5. Pengawasan Fisik

Pengawasan fisik berhubungan dengan :

1. Alat keamanan dan ukuran untuk menyelamatkan aktiva, catatan akuntansi dan formulir tercetak yang gagal penggunaannya;
2. Penggunaan alat yang mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

Pengawasan fisik yang berhubungan dengan pelaksanaan transaksi meliputi baik cash register yang mekanis dan elektronis.

6. Pemeriksaan Intern Secara Bebas

Prinsip ini dirancang untuk menentukan apakah unsur-unsur yang lain dalam sistem bekerja atau tidak. Agar unsur ini efektif maka ada tiga syarat :

1. Pengawasan dilakukan oleh orang perusahaan yang bebas dan yang bertanggungjawab untuk data tersebut.

²⁶ *Ibid*, h. 44

2. Pengawasan (monitoring) harus dilakukan pada saat atau waktu yang beralasan dan mendadak (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu).
3. Penyimpangan harus dilaporkan kepada manajemen dan yang berhak mengambil tindakan perbaikan.²⁷

b. Pengendalian Akuntansi dalam Perspektif Islam

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan. Sistem dalam islam adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, pelaksana sistem kehidupan secara konsisten dalam semua kehidupan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl : 97)

Sistem merupakan aturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi, sebaliknya apabila menolak aturan atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikan aturan dalam kehidupan, maka akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan sekarang dan menimbulkan kehidupan yang sempit serta kecelakaan diakhirat nanti.²⁸

²⁷ *Ibid*, h. 45

²⁸ *Ibid*, h. 46

4. Sistem Pelaporan

a. Pengertian Sistem Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya Negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi adalah laporan kinerja tahunan. Laporan akuntabilitas lazimnya juga dimasukkan sebagai laporan kinerja. Jadi, laporan akuntabilitas kinerja sama dengan LAKIP dan LAKIP pada dasarnya sama dengan laporan kinerja tahunan.²⁹

Sistem pelaporan seringkali dikembangkan terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya. Dalam lingkungan penyelenggaraan/tatalaksana administrasi yang menggunakan teknologi informasi sistem pelaporan menjadi bagian dari sistem informasi yang digunakan dalam berbagai hal, khususnya untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan manajemen.

Sistem dan proses pelaporan kinerja sebagai sebuah sub-sistem dari penyelenggaraan sistem manajemen di lingkungan instansi pemerintah juga harus dibangun dan dikembangkan secara terus menerus agar tujuan-tujuan memproduksi informasi dapat tercapai. Pada saat ini pengembangan sistem pelaporan kinerja agaknya masih ketinggalan dibandingkan dengan pengembangan sistem pelaporan keuangan. Hal ini memang dapat dimaklumi karena tata cara “penangkapan” data, pencatatan, pengikhtisaran informasi keuangan sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga sudah dicapai kesepakatan-kesepakatan dan standar-standar atau pembakuan dalam mengelola informasi keuangan. Disisi lain dalam pengelolaan informasi kinerja, agaknya masih sangat sulit dilakukan pembakuan-pembakuan karena dari sifatnya sendiri (inherent

²⁹ Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2011 tentang *Akuntabilitas Instansi Pemerintahan*, h. 3

characteristics). Oleh karena itu, pedoman-pedoman dan petunjuk-petunjuk atau pun modul pembelajaran dapat dipakai sebagai standar guna penyusunan laporan yang baik.

b. Pentingnya Laporan Kinerja

Dewasa ini tuntutan terhadap ketersediaan informasi kinerja bagi para manajer publik semakin tinggi. Pemimpin atau pejabat-pejabat pemerintahan selalu membutuhkan informasi kinerja manakala berhadapan dengan pihak-pihak lain seperti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD, dengan wartawan berbagai media, dengan lembaga swadaya masyarakat/LSM, dan dengan atasan masing-masing. Penguasaan informasi kinerja oleh pimpinan adalah hal mutlak yang harus ada dalam pikiran pimpinan tersebut ketika harus memberikan informasi kinerja tentang pelaksanaan tugasnya atau kinerja institusi atau unit kerja yang di pimpinya. Untuk mendapatkan informasi kinerja tersebut haruslah dirancang sistem pengumpulan datanya, sehingga dapat diproduksi laporan-laporan untuk berbagai tujuan.

Laporan kinerja sebagai salah satu laporan yang harus disiapkan baik untuk kepentingan pimpinan atau pihak eksternal instansi, pada saat ini sudah banyak dihubungkan dengan laporan keuangan. Khusus untuk laporan kinerja sebagai sebuah pertanggungjawaban atau laporan akuntabilitas kinerja disusun setahun sekali dan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Laporan kinerja yang harus disiapkan oleh instansi-instansi pemerintah saat ini berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja yang periodisasi pelaporannya triwulanan dan tahunan, dan menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim (laporan kinerja interm dilakukan triwulanan dan

disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan) dan Laporan Kinerja tahunan.

Laporan kinerja sebetulnya merupakan jendela bagi pihak luar untuk mengetahui kinerja di dalam organisasi instansi yang melaporkannya. Oleh karena itu, jendela itu akan memberikan “kesan pertama” kepada orang yang melihat ke dalam. Jika laporan kinerjanya bagus, orang luar tersebut akan berpikir, mungkin saja memang kinerjanya bagus. Dan kesan pertama ini akan sangat melekat, jika tidak ditemui hal yang buruk pihak eksternal tersebut pastilah akan mengira semuanya bagus, semua unit kerja bagus, dan seterusnya. Inilah pentingnya sebuah laporan kinerja, informasi kinerja yang ada di dalamnya haruslah diungkapkan dan disajikan secara baik sesuai dengan tanggung jawab pada tingkatannya.³⁰

B. Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Nama Variabel	Hasil Penelitian
1.	Yulia Cantika (2018)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem	X1 : Perencanaan Anggaran X2 : Kejelasan Sasaran Anggaran X3 : Sistem	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan berpengaruh

³⁰ Subki, Pentingnya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Banten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 2017)

		Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.	Pelaporan X4 : Sistem Pengendalian Internal Y : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan berdasarkan hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan uji analitik menunjukkan bahwa pengendalian internal merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. ³¹
2.	Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan Y1 : Akuntabilitas Kinerja Instansi	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif secara parsial Terhadap

³¹ Yulia cantika, "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar*, 2018.

		Pemerintah	Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Kinerja. ³²
3.	Dana Rizky Anatasia (2018)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggara dan Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh signifikan dan Sistem Pelaporan Berpengaruh Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. ³³
4.	Ahmad Rudi Yulianto, Osmad Muthaher (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem	Hasil Penelitian ini Menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggara, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Berpengaruh

³² Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 2020.

³³ Dana Rizky Anatasia, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).", *Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya*, 2018.

		Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati	Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. ³⁴
5.	Medelyn Sonya Mikoshi (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Emperis Koni Se Sumatera Barat).	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variable Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara parsial tidak berpengaruh sedangkan Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja. ³⁵
6.	Rusnanda Dian Kartika, Sukamto (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas	X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran X2 : Pengendalian Akuntansi X3 : Sistem Pelaporan Y : Akuntabilitas	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan variable

³⁴ Ahmad Rudi Yulianto, Osmad Muthaher, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati.", *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, 2019.

³⁵ Medelyn Sonya Mikoshi, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Emperis Koni Se Sumatera Barat)". *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*, 2020.

		Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Daerah Kota Surabaya)	Kinerja Instansi Pemerintah	pengendalian akuntansi dan system pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. ³⁶
7.	Mulyadi AR, Syamsidar, Dedy Efendy (2018)	Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh)	X1 : Sistem Pelaporan X2 : Kejelasan Sasaran Anggaran Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa system pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. ³⁷

1. Persamaan dan perbedaan penelitian Yulia Cantika (2018) dengan penelitian ini adalah :

- a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta membahas tentang variabel yang sama yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan.

³⁶ Rusnanda Dian Kartika, Sukanto, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Daerah Kota Surabaya)." *Jurnal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2019

³⁷ Mulyadi AR, Syamsidar, Dedy Efendy, "Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh)." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh*, 2018

- b. Perbedaannya adalah memiliki 4 variabel bebas dan terdapat perbedaan pada studi kasus serta populasi dan sampelnya.
- 2. Persamaan dan perbedaan penelitian Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2020) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta memiliki kesamaan tiga variabel yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan.
 - b. Perbedaannya adalah terdapat perbedaan pada studi kasus serta populasi dan sampelnya.
- 3. Persamaan dan perbedaan penelitian Dana Rizky Anatasia (2018) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta membahas tentang tiga variabel yang sama yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan.
 - b. Perbedaannya adalah terdapat perbedaan pada studi kasus serta populasi dan sampelnya.
- 4. Persamaan dan perbedaan penelitian Ahmad Rudi Yulianto, Osmad Muthaheer (2019) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta membahas tentang tiga variabel yang sama yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan.
 - b. Perbedaannya adalah terdapat perbedaan pada studi kasus serta populasi dan sampelnya.
- 5. Persamaan dan perbedaan penelitian Medelyn Sonya Mikoshi (2020) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta memiliki kesamaan variabel yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan.
 - b. Perbedaannya adalah terdapat perbedaan pada studi kasus, populasi dan sampel.

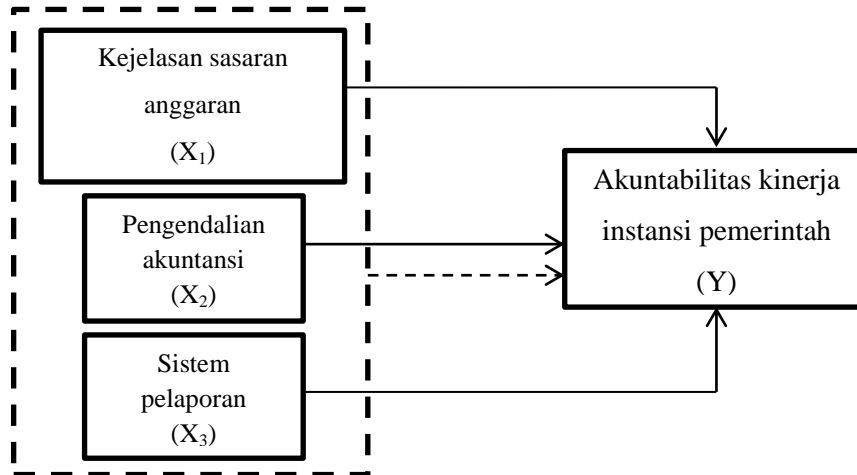
6. Persamaan dan perbedaan penelitian Rusnanda Dian Kartika, Sukamto (2019) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta membahas tentang tiga variabel yang sama yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan.
 - b. Perbedaannya adalah terdapat perbedaan pada studi kasus serta populasi dan sampelnya.
7. Persamaan dan perbedaan penelitian Mulyadi AR, Syamsidar, Dedy Efendy (2018) dengan penelitian ini adalah :
 - a. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif serta memiliki kesamaan variabel yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi.
 - b. Perbedaannya adalah terdapat perbedaan pada studi kasus serta populasi dan sampelnya, serta tidak memiliki variable X3.

C. Kerangka Konseptual

Dalam anggaran, perlu juga diketahui tentang kejelasan sasaran agar dapat memudahkan individu untuk menyusun target anggaran. Pencapaian kinerja manajerial yang baik harus juga menggunakan sistem pengendalian akuntansi. Sistem pelaporan yang baik juga diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan surat anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pengendalian akuntansi, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajerial khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya sasaran pemerintah daerah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis. Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang sudah diuraikan di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

H₂ : Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

H₃ : Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

H₄ : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel.³⁸ Peneliti menggunakan pendekatan asosiatif karena pertanyaan dalam penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara tiga variabel, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan simbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter.³⁹

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Medan tepatnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, di Jalan Kapten Maulana Lubis, No. 2, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei 2021 - Juni 2021.

³⁸ Chris. H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 16

³⁹ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UINSU PRESS, 2016), h. 7

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2020	Tahun 2021				
		Des	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1	Pengajuan Judul Proposal						
2	Bimbingan Proposal Skripsi						
3	Seminar Proposal						
4	Penelitian						
5	Bimbingan Skripsi						
6	Sidang Munaqasah						

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁰ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebanyak 40 orang pegawai yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dijelaskan dalam Tabel 3.2. sebagai berikut.

Tabel 3.2
Daftar Jumlah Pegawai

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala BPKAD	1

⁴⁰ *Ibid.*, h. 31

2	Sekretaris BPKAD	1
3	Sub Bagian Umum	5
4	Sub Bagian Aset dan Investasi	3
5	Sub Bagian Penyusunan Program	3
6	Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi	3
7	Sub Bidang Belanja Langsung	4
8	Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	4
9	Bidang Perbendaharaan	3
10	Sub Bidang Gaji	3
11	Sub Bidang Verifikasi dan Kas	3
12	Sub Bidang Akuntansi	3
13	Sub Bidang Pelaporan	4
	Jumlah	40

2. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Di sini sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.⁴¹

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Sampling Jenuh*.

⁴¹ Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta : CV.PUSTAKA ILMU, 2020), h. 362

Sampling jenuh yaitu suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁴² Apabila jumlah responden kurang dari 100 responden, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jadi jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 40 responden.

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu jenis data yang diperoleh dari perusahaan berupa angka atau bilangan sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.⁴³

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴⁴ Data ini diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau kuisioner yang nantinya akan diisi oleh responden yang terdiri dari pegawai pada level yang acak yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan tentang Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara objektif, terperinci, dan baik sesuai dengan kejadian dan permasalahan yang ada, maka metode atau teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuisioner. Angket atau kuisioner adalah teknik

⁴² *Ibid*

⁴³ Achmad Sani dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), h. 201

⁴⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Edisi Kedua*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 42

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁴⁵ Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dari responden. Kuisisioner diambil dari hasil penelitian terdahulu yang telah diuji oleh peneliti.⁴⁶

Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dimana responden menyatakan pendapatnya terhadap pernyataan. Setiap pertanyaan tersebut disertai 5 alternatif jawaban yang harus dipilih responden dan setiap jawaban tersebut dinilai dengan angka sebagai berikut :

1. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor : 5
2. Jawaban Setuju (S) diberi skor : 4
3. Jawaban Netral (N) diberi skor : 3
4. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor : 2
5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor : 1

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar data tersebut dapat ditarik kesimpulannya yang tepat, yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan keandalan data dalam penelitian ini yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel peneliti yang dapat dituju.⁴⁷ Variabel penelitian adalah suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Kalau diekspresikan secara berlebihan, variabel adalah sesuatu yang bervariasi. Variabel biasanya diekspresikan dalam bentuk simbol/lambang (umumnya digunakan simbol x dan y) yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai.⁴⁸

⁴⁵ Achmad Sani dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, h. 199

⁴⁶ Sulianto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2006), h. 134

⁴⁷ Achmad Sani dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, h. 200

⁴⁸ Arfan Ikhsan, et. al., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung : Cita Pustaka Media, 2014), h. 66

Ada dua macam variabel dalam penelitian ini, yaitu :⁴⁹

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen (*dependent variables*) atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf *y*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen (*independent variables*) disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf *x*. Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yang tergolong dalam variabel independen yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Pengendalian Akuntansi (X2), dan Sistem Pelaporan (X3).

Definisi operasional variabel penelitian dijelaskan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel Penelitian

No.	Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Y)	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan	1. Akuntabilitas proses 2. Akuntabilitas Program 3. Akuntabilitas kebijakan	<i>Likert</i>

⁴⁹ *Ibid.*, h. 67

		tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. (Modul akuntabilitas instansi pemerintah bpkp 2011).		
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggung jawaban 2. Perencanaan 3. Bidang kegiatan 4. Produk 5. Tingkat pengendalian 	<i>Likert</i>
3.	Pengendalian Akuntansi (X2)	Proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Kegiatan 2. Ruang lingkup 3. Sifat informasi 4. Sumber ilmu 	<i>Likert</i>

		dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 13 Tahun 2006).		
4.	Sistem Pelaporan (X3)	<p>suatu sistem yang dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran), yang dimana sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggung jawaban (Modul akuntabilitas instansi pemerintah bpkp 2011).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebab terjadinya penyimpangan 2. Tindakan yang diambil 3. Lamanya waktu koreksi 	<i>Likert</i>

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda, karena membahas tentang tiga buah variabel independen dan satu buah variabel dependen. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) Versi 20.0, kemudian dijelaskan secara deskriptif.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dengan analisis deskriptif, dimungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.⁵⁰ Penelitian ini menjabarkan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas merupakan produk dari validasi.⁵¹ Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Dalam mengukur validitas perhatian ditujukan pada isi dan kegunaan instrumen. Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu item dikatakan jika pernyataan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-

⁵⁰ Arfan Ikhsan, et.al., *Metodologi Penelitian Bisnis dan Manajemen*, h. 33

⁵¹ Eureka Pendidikan, "Pengertian Uji Validitas dan Reliabilitas Secara Empirik", <https://eurekapendidikan.com/pengertian-uji-validitas-dan-reliabilitas-empirik-teoritik>, Diunduh pada 11 September 2020

masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruknya. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan antara nilai korelasi atau r_{hitung} dari variabel penelitian dengan nilai r_{tabel} . Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruknya signifikan pada 0,05 atau 0,01 maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.⁵²

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebagai alat ukur yang berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen.⁵³ Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten. Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60.⁵⁴

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik adalah uji statistik untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas.⁵⁵ Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode *Ordinary Lest Square* (OLS). Setidaknya terdapat empat uji asumsi yang harus dilakukan :

⁵² Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 21

⁵³ Sinulingga, Sukaria, *Metodologi Penelitian*, (Medan : USU Press, 2015), h. 229

⁵⁴ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2016), h. 173

⁵⁵ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h. 93

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov*. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya.⁵⁶ Dasar pengambilan keputusannya yaitu :

- 1) Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5% maka data terdistribusi secara normal.
- 2) Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance Value*. Batas dari *Tolerance Value* adalah $> 0,10$ dari *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 .⁵⁷

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian ini, cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, yaitu dengan menggunakan uji Glejser dengan meregres nilai absolut residual

⁵⁶ Arfan Ikhsan, et.al., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, h.98

⁵⁷ Natak Riswanto, “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember”, *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2016, h. 4

terhadap variabel bebas $> 0,05$ maka model regresi tidak mengandung heterokedastisitas.⁵⁸

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X1), Pengendalian Akuntansi (X2), dan Sistem Pelaporan (X3) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.⁵⁹

Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dalam penelitian ini persamaan regresi linear berganda yaitu :

$$AKIP = a + b_1KJA + b_2PA + b_3SP + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

AKIP = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

KJA = Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

PA = Pengendalian Akuntansi (X2)

SP = Sistem Pelaporan (X3)

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi untuk X1, X2 dan X3

e = Faktor Gangguan

5. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak

⁵⁸ Patricia Runtuwen., et.al, "Pengaruh Penempatan Kerja, Mutasi, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Sulutgo Manado" *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2016, h. 275

⁵⁹ *Ibid*, h. 184f

pernyataan tersebut.⁶⁰ Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.⁶¹ Uji hipotesis terdiri dari beberapa uji yaitu sebagai berikut :

a. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinan adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.⁶²

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat.⁶³ Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai t hitung $> t$ tabel dan nilai Sig. t $< \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai t hitung $< t$ tabel dan nilai Sig. t $> \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

⁶⁰ Laylan syafina, *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*, (Medan : Febi Press UINSU, 2018), h. 35

⁶¹ *Ibid*, h. 36

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*, h. 39

terhadap variabel dependen.⁶⁴ Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $Sig. F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai $Sig. F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

⁶⁴ *Ibid*, h. 37

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka dibagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar dimana tahun 2007 telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional Nasional.

a. Geografi dan Demografi

Karakteristik Kota Medan didukung oleh luas wilayah 265,10 km² atau 3,6 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, dan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, barat, serta selatan. Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. memiliki posisi strategis yang semakin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi ini

menjadi modal dasar dalam pembangunan kota. Kota Medan, sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kota metropolitan baru memiliki posisi strategis yang semakin menguat baik secara regional maupun nasional. Posisi ini menjadi modal dasar dalam pembangunan kota.

Kota Medan sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kota metropolitan baru di Indonesia, memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia, yang didukung oleh ketersediaan Bandara Polonia dan Pelabuhan Laut Belawan serta infrastruktur dan utilitas kota lainnya. Kota Medan secara administratif pemerintahan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan. Berdasarkan batas wilayah administratif, Kota Medan relatif kecil dibanding kota lainnya, tetapi posisi secara ekonomi regional Kota Medan sangat penting karena berada dalam wilayah hinterland dengan basis ekonomi sumber daya alam yang relatif besar dan beragam, serta dukungan kepelabuhanan.

Dibanding kota besar lainnya, Kota Medan memiliki keterbatasan ruang sebagai akibat bentuk wilayah administratif yang ramping ditengah. Dengan keterbatasan ruang tersebut, daya dukung lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal terutama hambatan alamiah dalam pengembangan wilayah utara Kota Medan, khususnya dalam penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang seimbangnya dan kurang terpadunya penataan ruang kota di bagian utara dan bagian selatan.

a. Lambang Pemerintah Kota Medan



Gambar 4.1

Lambang Pemerintah Kota Medan

Makna dari lambang Pemerintah Kota Medan di atas adalah sebagai berikut :

1. 17 biji padi berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. 8 bunga kapas berarti bulan 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
3. 4 tiang dan 5 bahagian dari perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi Indonesia.
4. Satu bambu runcing yang terletak dibelakang perisai adalah lambang perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan pokok yang terpenting dihadapan bambu runcing berarti Kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.
5. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti

bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-sinar bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan.

6. Lima sinar bintang berarti lima bahan pokok terpenting yang diekspor dari Kota Medan dan lima bahagian perisasi berarti Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

b. Visi dan Misi

Visi Kota Medan Adalah **“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berbudaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”**.

Misi Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama

Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

2. Kreatifitas dan Inovasi

Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.

3. Kebhinekaan

Mengembangkan kepribadian masyarakat kota bersarakan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan.

5. Multikulturalisme

Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

6. Tata ruang kota yang konsisten

Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung

oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

7. Peningkatan Kesempatan Kerja

Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

8. *Smart City*

Mengembangkan Medan sebagai *Smart City*.

2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan

a. Sejarah Singkat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota Medan belum begitu kompleks maka bagian keuangan kota Medan terdiri dari 5 sub bagian yaitu anggaran, perbendaharaan, gaji, verifikasi, dan pembukuan. Dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk kota Medan, maka melalui peraturan daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Perda No. 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan yang terdiri dari 5 bagian tersebut ditingkatkan menjadi badan pengelola daerah keuangan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah Kota Medan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang mampu sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang profesional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah yang

profesional guna pengawasan dan akuntabilitas, kualitas serta penyusunan pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP).

Organisasi BPKAD Kota Medan terdiri dari :

- A. Badan
- B. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- C. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendapatan
 - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - c. Sub Bidang Belanja Langsung
- D. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Gaji
 - b. Sub Bidang Belanja
 - c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas
- E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi
 - b. Sub Bidang Pelaporan
- F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- G. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan berdiri pada tanggal 28 Desember 2011. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan diterapkan mulai 2011-2015.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasilguna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP). Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

“Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan Yang Profesional, Berwawasan Manajemen Pengelolaan Keuangan Yang Sistematis, Efisien Dan Efektif”.

Dalam mencapai visi organisasi, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Ketiga Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan di atas dapat dijelaskan dengan rasionalitas sebagai berikut :

1. Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Kota Medan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran merupakan penunjang kelancaran tugas - tugas pelayanan bagi aparatur sebagai aparatur Pemerintah Kota Medan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan sumber daya manusia (SDM) maka pelayanan administrasi dan aparatur dapat berjalan sesuai program dan rencana kerja yang telah disusun dan dapat menerapkan mutu pelayanan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan harus memiliki manfaat tepat guna yang berbasis kinerja sehingga dapat terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan sehingga aparatur pemerintah semakin memiliki pengetahuan, keahlian,

keterampilan, maupun pengalaman yang sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang diemban sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas transparan, efisien dan efektif.

3. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik.

Terkait dengan salah satu tujuan organisasi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemerataan pelayanan umum Pemerintah Kota Medan kepada masyarakat dengan pelayanan yang prima, terjangkau, dan adil maka disadari bahwa pada prakteknya, tujuan itu hanya dapat tercapai oleh sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan yang secara langsung berinteraksi dengan sistem teknologi yang harus diketahui oleh aparatur dan menyadari tugas pelayanan yang harus dilakukannya. Oleh karenanya motivasi, disiplin dan kualitas sumber daya aparatur sangat dibutuhkan guna mendukung penerapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan.

Bahwa untuk dapat tercapainya tujuan organisasi Kinerja organisasi akan selalu ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan disamping adanya peran penting faktor-faktor lain. Oleh karena itu, peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan mutlak harus dilakukan. Dalam batasan Misi di atas, peningkatan kinerja aparatur dapat terlepas dari makna peningkatan produktifitas kerja aparatur Pemerintah Kota Medan sehingga terbebas dari pemborosan dan ketidakefisienan. Menempatkan aparatur pada suatu gugus kerja yang jelas, peningkatan karier dan kesejahteraan yang sesuai dengan prestasi aparatur, kepuasan kerja, budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang secara simultan berkorelasi dalam proses peningkatan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah Kota Medan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

BPKAD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan.
4. Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah.

3. Deskripsi Data Penelitian

a. Uji Deskriptif

1) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh pegawai yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Populasi dan Sampel penelitian ini sebanyak 40 orang. Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki - laki	21	52.5	52.5	52.5
Valid Perempuan	19	47.5	47.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 orang responden, sebanyak 21 orang dengan persentase 52,5% berjenis kelamin laki-laki dan 19 orang dengan persentase 47,5% berjenis kelamin perempuan.

2) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh pegawai yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Populasi dan Sampel penelitian ini sebanyak 40 orang. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	1	2.5	2.5	2.5
D3	6	15.0	15.0	17.5
Valid S1	26	65.0	65.0	82.5
S2	7	17.5	17.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 orang responden, sebanyak 1 orang dengan persentase 2,5% berijazah SMA, sebanyak 6 orang dengan persentase 15,0% berijazah D3, sebanyak 26 orang dengan persentase 65,0% berijazah S1, dan sebanyak 7 orang dengan persentase 17,5% berijazah S2.

3) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Divisi Bagian Pekerjaan

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh pegawai yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Populasi dan Sampel penelitian ini sebanyak 40 orang. Deskriptif responden berdasarkan divisi bagian pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequenc y	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kepala BPKAD	1	2.5	2.5	2.5
Sekretaris BPKAD	1	2.5	2.5	5.0
Sub Bagian Umum	5	12.5	12.5	17.5
Sub Bagian Penyusunan Program	3	7.5	7.5	25.0
Sub Bidang Anggaran (Belanja Tidak Langsung)	4	10.0	10.0	35.0
Sub Bidang Anggaran (Belanja Langsung)	4	10.0	10.0	45.0
Sub Bidang Perbendaharaan	3	7.5	7.5	52.5
Sub Bidang Fasilitasi Gaji	3	7.5	7.5	60.0
Sub Bidang Kas	3	7.5	7.5	67.5
Sub Bidang Akuntansi	3	7.5	7.5	75.0
Sub Bidang Pelaporan	4	10.0	10.0	85.0
Sub Bidang Aset dan Investasi	3	7.5	7.5	92.5
Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi	3	7.5	7.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 responden, sebanyak 1 orang dengan persentase 2,5% merupakan kepala BPKAD, sebanyak 1 orang dengan persentase 2,5% merupakan sekretaris BPKAD, sebanyak 5 orang dengan persentase 12,5% merupakan pegawai sub bagian umum, sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5% merupakan pegawai sub bagian penyusunan program, sebanyak 4 orang dengan persentase 10,0% merupakan pegawai sub bidang

anggaran (belanja tidak langsung), sebanyak 4 orang dengan persentase 10,0% merupakan pegawai sub bidang anggaran (belanja langsung), sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5% merupakan pegawai sub bidang perbendaharaan, sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5% merupakan pegawai sub bidang fasilitas gaji, sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5% merupakan pegawai sub bidang kas, sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5% merupakan pegawai sub bidang akuntansi, sebanyak 4 orang dengan persentase 10,0% merupakan pegawai sub bidang pelaporan, sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5% merupakan pegawai sub bidang asset dan investasi, sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5% merupakan pegawai sub bidang pembiayaan dan investasi.

4) Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh pegawai yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Populasi dan Sampel penelitian ini sebanyak 40 orang. Deskriptif responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 30 - 34 Tahun	6	15.0	15.0	15.0
35 - 39 Tahun	10	25.0	25.0	40.0
40 - 44 Tahun	8	20.0	20.0	60.0
45 - 49 Tahun	5	12.5	12.5	72.5
50 - 54 Tahun	3	7.5	7.5	80.0

55 - 59 Tahun	8	20.0	20.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari 40 orang responden, sebanyak 6 orang dengan persentase 15,0% yang berusia 30 – 34 tahun, sebanyak 10 orang dengan persentase 25,0% yang berusia 35-39 tahun, sebanyak 8 orang dengan persentase 20,0% yang berusia 40-44 tahun, sebanyak 6 orang dengan persentase 12,5% yang berusia 45-49 tahun, sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5% yang berusia 50-54 tahun, sebanyak 8 orang dengan persentase 20,0% yang berusia 55-59 tahun.

b. Uji Deskriptif

Deskriptif kategori variabel menggambarkan tanggapan responden mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Analisis deskriptif ini terdiri dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Berikut ini adalah hasil analisis statistic deskriptif dari data penelitian ini yang diolah :

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran	40	19.00	25.00	915.00	22.8750	1.81430
Pengendalian Akuntansi	40	17.00	25.00	884.00	22.1000	2.08536
Sistem Pelaporan	40	20.00	25.00	977.00	24.4250	1.12973
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	40	10.00	25.00	788.00	19.7000	3.17199

Valid N (listwise)	40					
--------------------	----	--	--	--	--	--

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan table diatas terdapat 5 pertanyaan disetiap variable dengan jumlah responden berjumlah 40 orang. Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) responden memiliki nilai minimum 19 dan nilai paling tinggi 25. Nilai rata-rata Kejelasan Sasaran Anggaran masing-masing responden sebesar 22,8750 dengan simpang baku atau penyebaran rata-rata sebesar 1,81430. Pengendalian Akuntansi (X2) responden memiliki nilai minimum 17 dan nilai paling tinggi 25. Nilai rata-rata Pengendalian Akuntansi masing-masing responden sebesar 22,1000 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 2,08536. Sistem Pelaporan (X3) responden memiliki nilai minimum 20 dan nilai paling tinggi 25. Nilai rata-rata Sistem Pelaporan masing-masing responden sebesar 24,4250 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 1,12973. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) responden memiliki nilai minimum 10 dan nilai paling tinggi 25. Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masing-masing responden sebesar 19,7000 dengan simpangan baku atau penyebaran rata-rata sebesar 3,17199.

4. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk uji validitas kuisisioner dilakukan dengan membandingkan r hitung atau nilai *Pearson Correlation* dengan membandingkan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung $>$ r tabel (dengan sig. 0,05), maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jadi apabila nilai r hitung atau nilai *Pearson Correlation* lebih kecil dari nilai r tabel maka butir pertanyaan dalam kuisisioner untuk variabel tersebut tidak valid atau jika r hitung $<$ r table (dengan sig. 0,05), maka kuisisioner tersebut tidak valid.

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrument kepada 40 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ atau 5%.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

No	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
1	Ada kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja ini	0,797	0,312	Valid
2	Kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefinisikan dengan jelas dan komprehensif.	0,712	0,312	Valid
3	Dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran.	0,748	0,312	Valid
4	Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang	0,775	0,312	Valid

	mendukung tujuan tujuan instansi secara efektif			
5	Antara penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif.	0,508	0,312	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel Kejelasan Sasaran Anggaran menunjukkan bahwa adanya 5 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah Valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikan 5% sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

2. Variabel Pengendalian Akuntansi

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrument kepada 40 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ atau 5%.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Akuntansi (X2)

No	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
1	Audit atau pemeriksaan intern digunakan sebagai dasar alat pengambilan keputusan.	0,704	0,312	Valid
2	Kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefinisikan dengan jelas dan komprehensif.	0,766	0,312	Valid
3	Setiap transaksi yang terjadi pada instansi tempat saya bekerja telah didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.	0,737	0,312	Valid
4	Setiap transaksi telah dicatat dalam buku catatan akuntansi.	0,688	0,312	Valid

5	Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala subbagian keuangan/akuntansi sebelum didistribusikan.	0,861	0,312	Valid
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel Pengendalian Akuntansi menunjukkan bahwa adanya 5 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

3. Variabel Sistem Pelaporan

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrument kepada 40 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ atau 5%.

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pelaporan (X3)

No	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
1	Laporan keuangan telah disajikan secara lengkap.	0,754	0,312	Valid

2	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja, telah memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.	0,863	0,312	Valid
3	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.	0,704	0,312	Valid
4	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi keuangan pada laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji.	0,499	0,312	Valid
5	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	0,725	0,312	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel Sistem Pelaporan menunjukkan bahwa adanya 5 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

4. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrument kepada 40 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat korelasi $\alpha = 0,05$ atau 5%.

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
1	Visi dan misi program instansi tempat saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategic organisasi.	0,738	0,312	Valid
2	Pada instansi tempat saya berkerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.	0,800	0,312	Valid
3	Pada Instansi tempat saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah	0,820	0,312	Valid

	selesai dilaksanakan.			
4	Pada instansi tempat saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan.	0,847	0,312	Valid
5	Pada instansi tempat saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indicator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.	0,847	0,312	Valid

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa adanya 5 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

b. Uji Reliabilitas

Selanjutnya terdapat uji reliabilitas. Suatu kuisioner dinyatakan reliabel jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari

waktu. Pengujian reliabilitas untuk variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha*. Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dikategorikan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,759	0,60	Reliabel
Pengendalian Akuntansi (X2)	0,808	0,60	Reliabel
Sistem Pelaporan (X3)	0,756	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,865	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

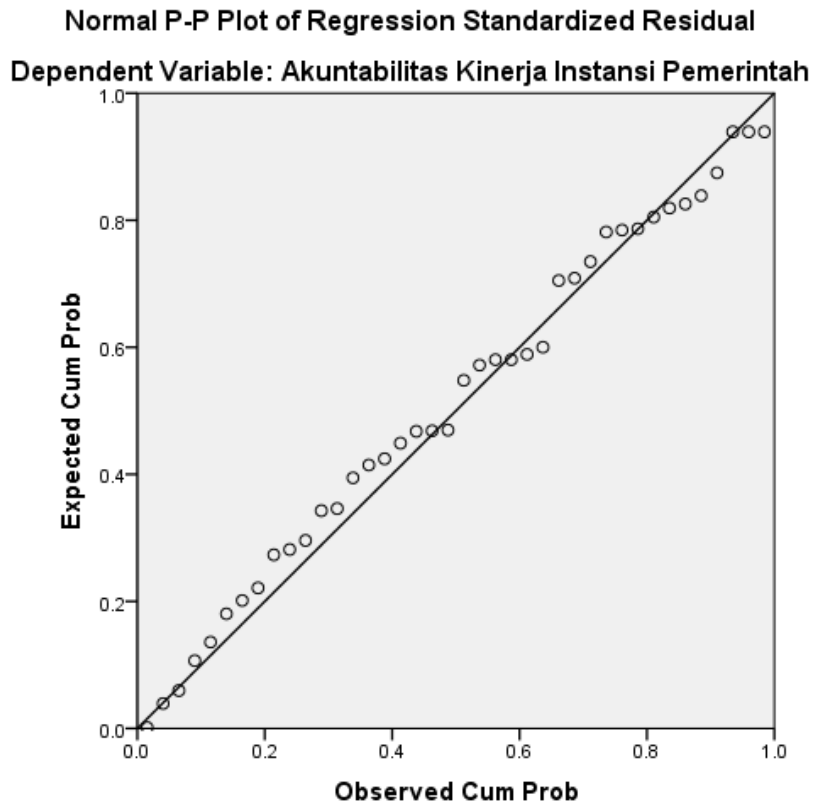
Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dan pernyataan pada setiap variabel penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Distribusi data akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih besar dari 0,05.⁶⁵

⁶⁵ Rochmat Adi Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Bersama SPSS*, (Ponorogo : CV Wade Group, 2017), h. 108

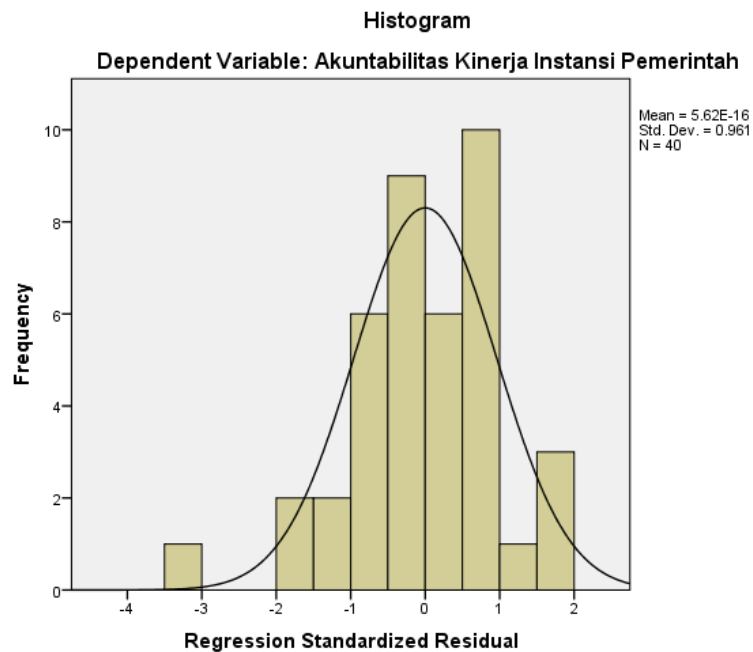


Hasil Uji Normalitas dengan Normal *P-Plot*

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik atau pola menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti diagonal tersebut sehingga data penelitian telah terdistribusi normal dan juga telah memenuhi model regresi yang baik.

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada diagram histogram pada gambar 4.2 sebagai berikut :



Gambar 4.3 Histogram

Dependen Variabel : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 4.3 di atas uji normalitas dengan histogram dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal karena kurva histogram di atas berbentuk parabola dan bukan garis linear.

Selanjutnya adalah menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov*. Apabila nilai *asymptotic significant (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* menggunakan *Software SPSS* dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	2.90350433
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.054
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.415
Asymp. Sig. (2-tailed)		.995

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Baik dilihat dari hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* nilai *asymptotic significant* (2 – tailed) di atas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hubungan linear antar variabel bebas disebut dengan Multikolinearitas. Dalam praktiknya, umumnya multikolinearitas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas yang secara matematis tidak berkorelasi (korelasi = 0) sekalipun secara substansi tidak berkorelasi. Secara umum, bila terjadi kolinearitas sempurna atau terjadi korelasi yang tinggi antar variabel bebas akan menyebabkan nilai determinan dari matriks $x'x$ akan mendekati 0 (akan sama dengan 0 jika korelasi sempurna), maka koefisien regresi tidak dapat diperoleh dikarenakan $(x'x)^{-1}$ tidak dapat dicari. Satu hal

yang perlu ditekankan kembali disini bahwa multikolinearitas merupakan hubungan linear.⁶⁶

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	29.560	13.255		2.230	.032		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.375	.338	-.215	-1.110	.274	.622	1.607
	Pengendalian Akuntansi	.609	.295	.400	2.063	.046	.618	1.619
	Sistem Pelaporan	-.603	.434	-.215	-1.389	.173	.972	1.029
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

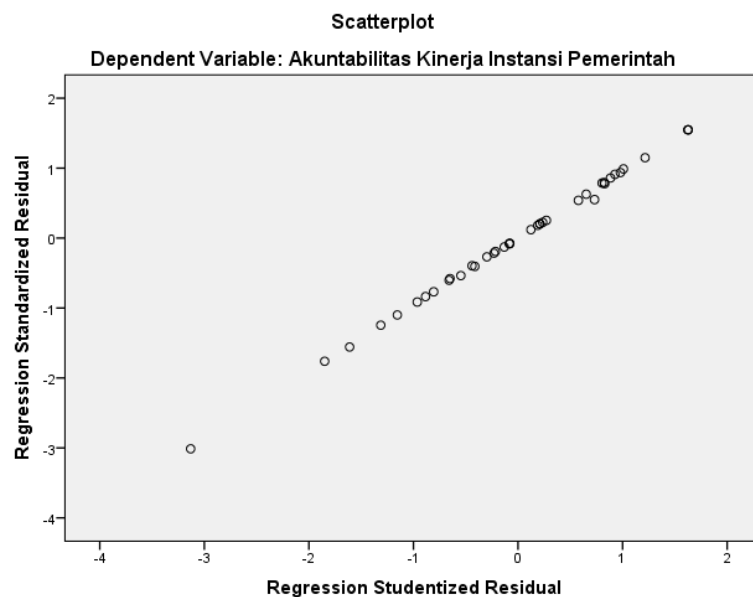
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar $1,607 < 10$, Pengendalian Akuntansi sebesar $1,619 < 10$, dan Sistem Pelaporan sebesar $1,029 < 10$. Dan untuk nilai *tolerance* Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 0,622, Pengendalian Akuntansi sebesar 0,618, dan Sistem Pelaporan sebesar 0,972 lebih besar dari 0,1. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamat lain. Regresi yang baik harusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika *varians* dari

⁶⁶ Robert Kurniawan, *Analisis Regresi dasar dan Penerapannya*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 233

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika titik-titik *scatter plot* membentuk pola-pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Namun jika titik-titik menyebar di atas dan bawah titik nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.



Gambar 4.4
Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatter Plot*

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukkan pola titik-titik pada grafik *scatter plot* tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah titik nol pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kualitas penyerapan anggaran.

4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	29.560	13.255		2.230	.032		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.375	.338	-.215	-1.110	.274	.622	1.607
	Pengendalian Akuntansi	.609	.295	.400	2.063	.046	.618	1.619
	Sistem Pelaporan	-.603	.434	-.215	-1.389	.173	.972	1.029
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari nilai-nilai koefisien di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$\text{Maka : } AK = 29,560 - 0,375KJA + 0,609PA - 0,603SP$$

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- Nilai *constant* (a) = 29,560 artinya apabila skor variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan sama dengan nol, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah naik sebesar 29,560.
- Ketika variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) ditingkatkan sebesar 1%, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meningkat sebesar -0,375 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.
- Ketika variabel Pengendalian Akuntansi (X2) ditingkatkan sebesar 1%, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan meningkat sebesar 0,609 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.

- d. Ketika variabel Sistem Pelaporan (X3) ditingkatkan sebesar 1%, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan meningkat sebesar -0,603 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan yang terjadi antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah hubungan yang negatif dimana ketika Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan ditingkatkan, maka akan berdampak penurunan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan hubungan yang terjadi antara Pengendalian Akuntansi dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah hubungan yang positif dimana ketika Pengendalian Akuntansi ditingkatkan, maka akan berdampak pada kenaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Arah pengaruh variabel dilihat berdasarkan nilai koefisien regresinya. Jika nilai koefisien regresinya positif, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien regresinya negatif, berarti variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen. Nilai t_{tabel} untuk diuji pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$, tabel distribusi t dicari pada $0,05 : 2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $40-3-1 = 36$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian dua sisi (signifikansi = 0,025) hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 2,028. Berikut ini adalah hasil uji t :

Tabel 4.14
Hasil Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	29.560	13.255		2.230	.032		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.375	.338	-.215	-1.110	.274	.622	1.607
	Pengendalian Akuntansi	.609	.295	.400	2.063	.046	.618	1.619
	Sistem Pelaporan	-.603	.434	-.215	-1.389	.173	.972	1.029
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah								

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

- 1) Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar -1,110 dengan signifikansi sebesar 5%. Karena t_{hitung} untuk variabel X1 (-1,110) < t_{tabel} (2,028) dengan nilai sebesar 0,274 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga membuktikan bahwa Ha1 ditolak dan H01 diterima.
- 2) Variabel Pengendalian Akuntansi dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,063 dengan signifikansi sebesar 5%. Karena t_{hitung} untuk variabel X2 (2,063) > t_{tabel} (2,028) dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Pengendalian Akuntansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga membuktikan bahwa Ha2 diterima dan H02 ditolak.
- 3) Variabel Sistem Pelaporan dengan nilai t_{hitung} sebesar -1,389 dengan signifikansi sebesar 5%. Karena t_{hitung} untuk variabel X3 (-1,389) < t_{tabel}

(2,028) dengan nilai signifikansi sebesar $0,173 > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pelaporan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga membuktikan bahwa H_{a3} ditolak dan H_{03} diterima.

b. Uji F (Simultan)

Uji statistik F atau uji simultan merupakan kelayakan model/uji statistik untuk menunjukkan apakah secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat simultan signifikan sebesar 5% atau 0,05.

Nilai F_{tabel} untuk diuji pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dan cara menentukan F_{tabel} yaitu $df(n1) = k-1$ atau $4-1 = 3$. Dan $df(n2) = n-k$ atau $40-4 = 36$. Maka dapat diperoleh F_{tabel} sebesar 2,87.

Tabel 4.15
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.617	3	21.206	3.322	.031 ^b
	Residual	328.783	36	9.133		
	Total	392.400	39			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,031 dan nilai F_{hitung} sebesar 3,322. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan $< 0,05$ ($\text{Sig} < 0,05$) maka kesimpulannya adalah signifikan. Terlihat pada tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi (0,031) $< 0,05$. Maka

keputusannya adalah signifikan. Artinya H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) seluruh variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Untuk nilai F_{hitung} dalam persamaan ini sebesar 3,322 adapun untuk nilai F_{tabel} sebesar 2,87 maka F_{hitung} (3,322) lebih besar daripada F_{tabel} (2,87) sehingga keputusan H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji determinan dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Berikut ini adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh dari hasil output SPSS.

Tabel 4.16

Hasil Uji R^2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.483 ^a	.356	.138	3.02406

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,356. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan mampu menjelaskan variabel terikat yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 35,6%

sedangkan sisanya sebesar 64,4% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model regresi.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, tabel pada uji t di atas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -1,110 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 40 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,028. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} >$ daripada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan tidak berpengaruh. Karena t_{hitung} untuk variabel X_1 (-1,110) $<$ t_{tabel} (2,028) maka keputusannya H_a1 ditolak dan H_01 diterima. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Adanya hasil yang belum konsisten antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menandakan bahwa masih terdapat sasaran anggaran yang belum jelas disebabkan dari pelaksanaan anggaran yang masih bingung, belum tenang dan belum puas dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan anggaran belum termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan sehingga terjadinya penurunan dalam akuntabilitas kinerjanya. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Herwin Kurniawan (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan menunjukkan bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, tabel pada uji t di atas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,063 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 40 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,028. Kemudian kita membandingkan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh. Karena t_{hitung} untuk variabel X2 (2,063) $>$ t_{tabel} (2,028) maka keputusannya H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Variabel Pengendalian Akuntansi (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dinilai baik mulai dari pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan yang disampaikan dan memiliki hubungan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semakin baik Pengendalian Akuntansi maka semakin baik pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Karismawati Agustin (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta). menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, tabel pada uji t di atas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -1,389 dengan signifikansi sebesar 5% nilai t_{tabel} untuk jumlah data sebesar 40 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 3

dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,028. Kemudian kita membandingkan jika $t_{\text{hitung}} >$ daripada t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan tidak berpengaruh. Karena t_{hitung} untuk variabel X3 (-1,389) $<$ t_{tabel} (2,028) maka keputusannya H_{a3} ditolak dan H_{03} diterima. Variabel Sistem Pelaporan (X3) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Dalam penelitian ini tidak berpengaruh disebabkan oleh adanya kondisi di mana pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan penggunaan system pelaporan yang tersedia yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk mengembangkan akuntabilitas kinerjanya lebih baik lagi

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa variabel Sistem Pelaporan mempunyai pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, tabel pada uji f (uji simultan) diatas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3,322 dengan signifikan sebesar 5% nilai F_{tabel} untuk jumlah data sebesar 40 (n) dan variable bebas (k) sebanyak 3 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 2,87. Kemudian kita membandingkan jika f_{hitung} (3,322) $>$ dari pada F_{tabel} (2,87) maka keputusannya H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak, yang artinya seluruh variabel independen (bebas) yang terdiri dari variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (terikat), yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan system pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan yang jelas dapat meningkatkan kinerja manajerial khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah untuk mendukung meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rudi Yulianto, Osmad Muthaher (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
4. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan system pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Bagi para pegawai BPKAD Kota Medan diharapkan untuk terus mempertahankan dan memaksimalkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan memberikan edukasi seperti bimtek, workshop, seminar kepada pegawai terkait penggunaan system baru.
2. Bagi Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat memperhatikan kejelasan sasaran anggaran dalam penyusunan anggaran dan lebih memberikan pelatihan atas penggunaan system informasi terbaru yang dipakai oleh pemerintah kota medan.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tidak hanya sebatas pada variabel-variabel yang peneliti ambil untuk diteliti.
4. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan yang jelas dapat meningkatkan kinerja manajerial khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah Kota Medan untuk mendukung meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Bi Rahmani, Nur, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan : FEBI UINSU PRESS, 2016
- Anatasia, Dana Rizky, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan), *Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya*, 2018.
- Anjarwati, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (studi pada SKPD se-Kabupaten, Kota Tegan dan Kabupaten Pemalang), *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, 2012
- Anjarwati, Mei, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, 2012
- AR, Mulyadi, Syamsidar, Dedy Efendy, Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh*, 2018
- Bayu Putri Perwirasari, Fajar, Faktor Faktor yang Mmepengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*, 2016
- Cantika, Yulia, Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.”
Jurnal Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Devika diah, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang, *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 2015

Eureka Pendidikan, *Pengertian Uji Validitas dan Reliabilitas Secara Empirik*,
<https://eurekapedidikan.com/pengertian-uji-validitas-dan-reliabilitas-empirik-teoritik>, (Diunduh pada 11 September 2020)

Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang :
 Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011

H. Timotius, Chris, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2017

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta :
 CV.PUSTAKA ILMU, 2020

Hendriani Y, Margaretha, Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, *Jurnal Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2011

Herawaty, Netty, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah Kota Jambi, *Jurnal Akuntansi*, 2011

Hidayatullah, Afilu, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke, *Jurnal Universitas Musamus Merauke*, 2010.

Ikhsan, Arfan, *Akuntansi Sektor Publik*, Medan : MADENATERA, 2018

— *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*,
Bandung : Cita Pustaka Media, 2014

Indraswari Kusumaningrum, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Tesis Pascasarjana Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro*, 2010

Isnanto, Yogi, Suharno, Bambang Widarno, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 2020.

Kadek Rina Primayoni, Ni dan Sujana, Edy, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Klungkung), *Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 2, No. 1, 2014

Kaltsum, Ummu, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga), *Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 2011

Kartika, Rusnanda Dian, Sukamto, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Daerah Kota Surabaya). *Jurnal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2019

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Bil Hadis*,
Bandung : Cordoba, 2019

Khumaidah, Niswatul, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, *Jurnal Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018

Kurniawan, Robert, Analisis Regresi dasar dan Penerapannya, Jakarta : Kencana, 2016

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009

Mikoshi, Medelyn Sonya, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Emperis Koni Se Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*, 2020.

Modul Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Akuntabilitas Instansi Pemerintahan*, 2011

Purnomo, Rochmat Adi, Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Bersama SPSS, Ponorogo : CV Wade Group, 2017)

Ridwan, Muhammad, Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen), *Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2016

Riswanto, Natak, Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2016

Runtuwen., Patricia, Pengaruh Penempatan Kerja, Mutasi, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Solutgo Manado, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 2016

- Sani, Achmad dan Machfudz, Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang : UIN-Maliki Press, 2010
- Setyawan, Hari, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variable Moderating, *Jurnal Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2017
- Sinulingga, Sukaria, *Metodologi Penelitian*, Medan : USU Press, 2015
- Siregar, Baldric, *Akuntansi Biaya Edisi 2*, Jakarta : Salemba Empat, 2013
- Siregar, Syofian, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pres, 2016
- Subki, *Pentingnya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah*, Banten: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 2017
- Sulianto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2006
- Syafina, Laylan, *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*, Medan : Febi Press UINSU, 2018
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Edisi Kedua*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Wahyuni, Adri Satriawan Surya, Raja dan Savitri, Enni, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu), *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2014
- Yulianti, Reni, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan), *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, Vol 1, No. 2, 2014

Yulianto, Ahmad Rudi, Osmad Muthaher, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN)

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya. Dan saya menjamin serta bertanggung jawab atas informasi yang Bapak/Ibu berikan adalah untuk kepentingan akademis semata. Atas bantuan dan kerja sama yang Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan Terima Kasih.

Muhammad Hafzhan

NIM. 0502173443

Petunjuk Pengisian

Cara pengisian kuisisioner ini adalah dengan memilih salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu untuk masing-masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuisisioner. Bapak/Ibu cukup memberikan tanda centang (✓) pada kolom kode jawaban yang tersedia yaitu: SS, S, N, TS, dan STS. Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Netral (N)

Skor 4 = Setuju (S)

Skor 5 = Sangat Setuju (SS)

IDENTITAS RESPONDEN

Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan identitas Bapak/Ibu, mohon dilengkapi dengan mengisi titik-titik dan memberi tanda silang pada pilihan jawaban yang tersedia.

Nama Responden :

Umur Responden : Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

Pekerjaan :

Jabatan :

Lama menduduki jabatan ini : Tahun

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ D3 ☐ S3
☐ S1 ☐ S2

DAFTAR PERTANYAAN KUISIONER

1. KEJELASAN SASARAN ANGGARAN (X1)

No	Pernyataan	Penilaian				
		SS	S	N	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Ada kejelasan sasaran anggaran pada satuan kerja ini					
2	Kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefinisikan dengan jelas dan komprehensif.					
3	Dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang tinggi untuk mencapai sasaran anggaran.					
4	Kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan tujuan instansi secara efektif					
5	Antara penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif.					

Sumber : Karismawati Agustin, 2018. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y)

No	Pernyataan	Penilaian				
		SS	S	N	TS	STS
		(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1	Visi dan misi program instansi tempat saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategic organisasi.					
2	Pada instansi tempat saya berkerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.					
3	Pada Instansi tempat saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.					
4	Pada instansi tempat saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan yang akan disampaikan kepada atasan.					

Lampiran II

Tabel F, Tabel t, dan Tabel R

1. Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97

35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79

80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

2. Tabel t

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103

28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733

73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

3. Tabel R

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230

27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Lampiran III

Hasil Uji SPSS

Frekuensi Data Berdasarkan Identitas

Statistics

		Jenis Kelamin	Pendidikan	Divisi	Usia
N	Valid	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0

Uji Validitas

1. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Jumlah
P1	Pearson Correlation	1	.618**	.311	.390*	.392*	.704**
	Sig. (2-tailed)		.000	.051	.013	.012	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P2	Pearson Correlation	.618**	1	.375*	.282	.585**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000		.017	.077	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P3	Pearson Correlation	.311	.375*	1	.387*	.639**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.051	.017		.014	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P4	Pearson Correlation	.390*	.282	.387*	1	.588**	.688**
	Sig. (2-tailed)	.013	.077	.014		.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P5	Pearson Correlation	.392*	.585**	.639**	.588**	1	.861**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.000	.000		.000
	N	40	40	40	40	40	40

Jumlah	Pearson						
	Correlation	.704**	.766**	.737**	.688**	.861**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Variabel Pengendalian Akuntansi

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	Jumlah
P1	Pearson						
	Correlation	1	.618**	.311	.390*	.392*	.704**
	Sig. (2-tailed)		.000	.051	.013	.012	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P2	Pearson						
	Correlation	.618**	1	.375*	.282	.585**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000		.017	.077	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P3	Pearson						
	Correlation	.311	.375*	1	.387*	.639**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.051	.017		.014	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P4	Pearson						
	Correlation	.390*	.282	.387*	1	.588**	.688**
	Sig. (2-tailed)	.013	.077	.014		.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P5	Pearson						
	Correlation	.392*	.585**	.639**	.588**	1	.861**
	Sig. (2-tailed)	.012	.000	.000	.000		.000
	N	40	40	40	40	40	40
Jumlah	Pearson						
	Correlation	.704**	.766**	.737**	.688**	.861**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Variabel Sistem Pelaporan

		Correlations					
		P1	P2	P3	P4	P5	Jumlah
P1	Pearson Correlation	1	.567**	.607**	.260	.265	.754**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.105	.099	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P2	Pearson Correlation	.567**	1	.459**	.172	.665**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000		.003	.288	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P3	Pearson Correlation	.607**	.459**	1	.474**	.225	.704**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.002	.163	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P4	Pearson Correlation	.260	.172	.474**	1	.225	.499**
	Sig. (2-tailed)	.105	.288	.002		.163	.001
	N	40	40	40	40	40	40
P5	Pearson Correlation	.265	.665**	.225	.225	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	.099	.000	.163	.163		.000
	N	40	40	40	40	40	40
Jumlah	Pearson Correlation	.754**	.863**	.704**	.499**	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	40	40	40	40	40	40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

		Correlations					
		P1	P2	P3	P4	P5	Jumlah
P1	Pearson Correlation	1	.604**	.438**	.434**	.434**	.738**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.005	.005	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P2	Pearson Correlation	.604**	1	.752**	.449**	.449**	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.004	.004	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P3	Pearson Correlation	.438**	.752**	1	.579**	.579**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000		.000	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P4	Pearson Correlation	.434**	.449**	.579**	1	1.000**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.005	.004	.000		.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40
P5	Pearson Correlation	.434**	.449**	.579**	1.000**	1	.847**
	Sig. (2-tailed)	.005	.004	.000	.000		.000
	N	40	40	40	40	40	40
Jumlah	Pearson Correlation	.738**	.800**	.820**	.847**	.847**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Hasil Uji Reliabilitas Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi,
Sistem Pelaporan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.808	.808	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.808	.808	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.756	.763	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.865	.870	5

Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.617	3	21.206	3.322	.031 ^b
	Residual	328.783	36	9.133		
	Total	392.400	39			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi

Hasil Uji R² (Koefisien Determinan)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.483 ^a	.356	.138	3.02406

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki - laki	21	52.5	52.5	52.5
Valid Perempuan	19	47.5	47.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	1	2.5	2.5	2.5
D3	6	15.0	15.0	17.5
Valid S1	26	65.0	65.0	82.5
S2	7	17.5	17.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kepala BPKAD	1	2.5	2.5	2.5
Sekretaris BPKAD	1	2.5	2.5	5.0
Sub Bagian Umum	5	12.5	12.5	17.5
Sub Bagian Penyusunan Program	3	7.5	7.5	25.0
Sub Bidang Anggaran (Belanja Tidak Langsung)	4	10.0	10.0	35.0
Valid Sub Bidang Anggaran (Belanja Langsung)	4	10.0	10.0	45.0
Sub Bidang Perbendaharaan	3	7.5	7.5	52.5
Sub Bidang Fasilitasi Gaji	3	7.5	7.5	60.0
Sub Bidang Kas	3	7.5	7.5	67.5
Sub Bidang Akuntansi	3	7.5	7.5	75.0
Sub Bidang Pelaporan	4	10.0	10.0	85.0

Sub Bidang Aset dan Investasi	3	7.5	7.5	92.5
Sub Bidang Pembiayaan dan Investasi	3	7.5	7.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
6	15.0	15.0	15.0
10	25.0	25.0	40.0
8	20.0	20.0	60.0
5	12.5	12.5	72.5
3	7.5	7.5	80.0
8	20.0	20.0	100.0
40	100.0	100.0	

Lampiran IV
Hasil Jawaban Responden

NO RESPONDEN	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Pengendalian Akuntansi (X2)	Sistem Pelaporan (X3)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
1	22	22	25	18
2	22	22	24	19
3	23	20	23	20
4	21	22	24	23
5	24	20	25	20
6	24	20	25	17
7	22	22	25	22
8	21	21	25	19
9	23	21	24	19
10	19	22	25	19
11	22	23	25	20
12	20	22	25	22
13	21	19	25	21
14	21	21	22	20
15	21	21	25	20
16	22	21	22	19
17	21	21	25	20
18	22	20	25	21
19	23	21	25	19
20	23	22	23	21
21	22	21	25	22
22	23	22	25	19
23	23	22	25	22
24	20	21	25	17
25	20	21	25	16
26	23	18	25	16
27	22	17	25	16
28	25	25	25	17
29	25	23	25	21
30	25	25	25	21
31	25	25	25	18

32	25	25	23	19
33	25	23	24	15
34	25	25	25	15
35	25	23	25	10
36	25	25	23	25
37	25	25	20	25
38	25	25	25	25
39	25	25	25	25
40	25	25	25	25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Muhammad Hafzhan
 NIM : 0502173443
 TTL : Medan, 29 Februari 2000
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Pancing I Lingkungan VII, Kelurahan Besar, Kecamatan
 Medan Labuhan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Perguruan Al-Washliyah 29 Tahun 2011
2. Tamatan SMP Perguruan Al-Washliyah 30 Tahun 2014
3. Tamatan SMA Perguruan Laksamana Martadinata Tahun 2017
4. Tamatan S1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI DAN PENGALAMAN KEGIATAN

1. Kader Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economics (KSEI UIE) FEBI UIN-SU (2017)
2. Staff Kewirausahaan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (DEMA) FEBI UIN-SU (2018-2019)
3. Sekretaris Bidang Informasi dan Teknologi Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah (HMJ AKS) FEBI UIN-SU (2019-2021)
4. Wakil Presiden Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economics (KSEI UIE) FEBI UIN-SU (2019-2020)
5. Sekrearis Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Medan Labuhan (2019-2021)
6. Anggota Bidang Media Komunikasi dan Informasi Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat UIN-SU (2020-2021)